

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Diplomatik Indonesia-Australia dibuka tahun 1949, dan Indonesia membuka hubungan diplomatic penuh pada tanggal 17 Maret 1950 dengan menunjuk Dr. Oesman Sastroamidjojo sebagai Kuasa Usaha ad Interim yang untuk sementara menempati Gedung Arsip Nasional Nasional di Canberra. Dr. Oesman kemudian kembali ke Indonesia tanggal 5 Juli 1950 dan digantikan oleh Oetojo Ramelan sebagai Duta Besar Penuh. Kantor Perwakilan RI di Canberra pada saat itu berpindah-pindah, dan baru pada bulan Agustus 1971 menempati Kantor Permanen yang ada saat ini di daerah Yarralumla, yang merupakan daerah lingkungan perwakilan-perwakilan asing di Canberra ([www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)).

Dasar-dasar hubungan Indonesia-Australia relatif kokoh. Hal ini mengingat komitmen pemimpin kedua Negara untuk mengembangkan *good neighborliness*, adanya peluang untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan serta terdapatnya instrument legal/normative antara lain *Joint Declaration on Comprehensive Partnership (2005)* serta *Lombok Treaty (2006)* ([www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)).

Deklarasi *Comprehensive Partnership* memuat *roadmap* bagi pengembangan hubungan bilateral ke depan (*expand and deepen*) antara Indonesia dan Australia melalui forum-forum konkrit seperti IAMF (*Indonesia-Australia Ministerial Forum*). Sementara itu, *Lombok Treaty* memuat prinsip-

prinsip penting, seperti penghormatan terhadap kedaulatan nasional, integritas wilayah serta komitmen kedua Negara untuk tidak membiarkan wilayah masing-masing dijadikan sebagai *staging point* untuk mengusung tujuan *sparatisme* ([www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)).

Indonesia merupakan negara penerima ODA terbesar dari Australia. Dari total ODA Australia sebesar A\$ 3,7 milyar pada 2008-2009, Indonesia mendapat A\$ 462 juta atau naik A\$ 3,2 juta dari periode sebelumnya (A\$ 458,8 juta), terdiri dari *Country Program* (A\$ 182,7 juta) dan AIPRD (A\$ 230,9 juta). Bantuan pembangunan ini antara lain digulirkan di bidang *education and scholarship; governance; human security and stability; infrastructure and regional development; Aceh rehabilitation and health*. Dalam kerangka AIPRD (hingga 2009), Australia akan membangun 2000 gedung SMP di berbagai wilayah di Indonesia dan saat ini telah dibangun lebih dari 1.000 gedung SMP. Dalam kesempatan kunjungan ke Indonesia tanggal 11-12 Agustus 2008, Menlu Stephen Smith bersama Menlu Hassan Wirajuda meresmikan gedung sekolah SMPN 4 Pallangga, Gowa yang merupakan sekolah ke-1000 dari rencana 2000 sekolah dimaksud. ([www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id))

Hubungan kedua Negara ini merupakan bagian dari hubungan internasional dimana hubungan internasional merupakan interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan seperti pengelompokan regional, aliansi, persekutuan ekonomi dan perdagangan, blok ideologi, pengelompokan dalam PBB, dan sebagainya (mas'oed. 1990 :47).

Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan

penting dalam ASEAN sehingga dapat menjembatani hubungan perdagangan Australia dengan negara-negara Anggota ASEAN. Meskipun Indonesia hanyaberadapada tingkat ke-11 mitra dagang Australia, Indonesia adalahnegara ASEAN terbesardari segi jumlah populasi dan luas wilayah sehingga dapat menjadi pasar yang besar bagi Australia (Cipto. 2010: 192).

Dalam perjalanannya, hubungan antara Indonesia dan Australia tidak terlepas dari konflik. Dimana konflik dalam kehidupan sosial diartikan sebagai benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidakmelibatkanduapihakataulebih (Setiadi, Usman Kolip 2013: 54 ). Ketika terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Australia turut campur dengan berpihak kepada Malaysia. Militer Australia yang ketika itu mendukung Malaysia, terlibat pertempuran dengan militer Indonesia di Borneo (Kalimantan). Masa Pemerintahan Orde Baru di Indonesia merupakan suatu masa berkembangnya hubungan antara Indonesia dengan Australia.

Indonesia dan Australia adalah dua negara yang bertetangga dekat dan telah lama menjalin hubungan kerjasama dalam berbagai bidang. Kedekatan geografis diantara kedua negara yang menjadikan Indonesia dan Australia merasa penting untuk menjalin hubungan itu, meskipun dalam fenomenanya sering dihiasi oleh berbagai gesekan atau ketegangan dan memiliki perbedaan dalam berbagai hal, yang dalam perjalanan hubungan antar kedua negara memberikan dinamika dalam hal ketegangan bahkan perselisihan.

Hubungan antara Indonesia dengan Australia kembali memburuk pasca dijadwalkannya eksekusi mati warga negara Australia yaitu Andrew Chan dan

Myuran Sukumaran atau akrab dipanggil *duo bali nine* yang dipidana hukuman mati akibat kepemilikan Narkoba bersama beberapa terpidana lainnya. Kedua narapidana asal Australia itu dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Bali pada tanggal 14 Februari 2006 karena menyelundupkan 8 kg heroin ke Australia. Putusan hukuman mati tersebut dijatuhkan oleh pengadilan independen tanpa campur tangan pemerintah.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Australia untuk meminta pengampunan terhadap dua terpidana mati warga negaranya itu. Melalui suratnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menawarkan pertukaran Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dengan tiga tahanan narkoba asal Indonesia yang menyelundupkan 390 kilogram heroin ke Australia ([www.harianterbit.com](http://www.harianterbit.com)).

Upaya diplomasi, negosiasi, dan istana yang dilakukan pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia tidak membuahkan hasil. Diplomasi, negosiasi, dan tekanan yang pemerintah Australia agar kehakiman di Indonesia mengurangi hukuman bagi *duo* terpidana mati asal Australia merupakan bentuk adanya hubungan yang terjalin diantara kedua negara. Namun demikian, kehakiman maupun Presiden Indonesia tidak menggunakan otoritasnya untuk menyelamatkan *duo* terpidana mati *bali nine* dari hukuman mati. Kita ketahui bersama bahwa otoritas merupakan suatu legitimasi atau dasar suatu kepercayaan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Hal ini tentunya mendapat respon negatif dari pemerintah Australia dan beberapa negara yang menentang hukuman mati.

Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki-moon mengimbau Indonesia untuk tidak mengeksekusi 12 terpidana mati kasus narkoba, yaitu warga Australia, Brazil, Perancis, Ghana, Nigeria, Filipina dan empat warga Negara Indonesia. Menghadapi berbagai tekanan internasional, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia harus tegas dalam penegakan hukum terkait narkoba karena jika dibiarkan dan ada pengampunan, Indonesia dapat menjadi negara yang hancur padahal Indonesia dalam keadaan darurat narkoba ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

Pemerintah Indonesia menganggap pelaksanaan hukuman mati merupakan keputusan tepat sebagai upaya menciptakan efek jera bagi para bandar dan pengedar narkoba. Yang tidak kalah pentingnya, respon Pemerintah Indonesia tersebut juga sekaligus diarahkan untuk menjaga kedaulatan hukum Indonesia yang sedang menghadapi darurat narkoba.

Eksekusi mati kedua warga negara Australia itupun dilakukan pada tanggal 29 April 2015 pasca ditolaknya permohonan grasi yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Eksekusi mati yang dilakukan Indonesia ini langsung disikapi dengan penarikan duta besar Australia untuk Indonesia.

Ditariknya duta besar Australia dari Indonesia tidak serta merta ditanggapi hal serupa oleh Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia yang diwakili menteri luar negeri Retno Marsudi menyatakan tidak punya rencana untuk menarik duta besar Indonesia dari Negara Kangguru itu ([tempo.com](http://tempo.com)).

Dalam rangka menatap masa depan bersama, Indonesia dan Australia wajib melihat ulang aspek-aspek yang terkait hubungan bilateral dengan mempertahankan bahkan memperluas kerja sama diantara kedua negara,

melibatkan sebanyak mungkin aktor antara kedua negara. Hubungan yang kian kuat juga memaksa penggunaan berbagai jenis interaksi dan instrumen diplomasi.

Melihat dinamika yang terjadi pada hubungan antara Indonesia dan Australia tentu menarik untuk diteliti bagaimana hubungan kedua Negara pasca dilakukannya eksekusi *duo bali nine* ini.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pembahasan latar belakang permasalahan dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Eksekusi hukuman mati bagi kelompok bali nine.
2. Respon pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia mengenai akan dieksekusi matinya dua warga Negara mereka yang tergabung dalam kelompok bali nine.
3. Hubungan antara Indonesia dan Australia pasaca dilakukannya eksekusi mati duo bali nine pada bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

### **C. Fokus Penelitian**

Emory (dalam buku sugiyono, 205 : 2013) menyatakan bahwa baik penelitian murni maupun terapan, semuanya berangkat dari masalah, hanya untuk penelitian terapan, hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan.

Maka berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis memberikan fokus penelitian pada pengaruh eksekusi mati duo bali nine terhadap kerjasama Australia-Indonesia pada bidang Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya. Batasan ini digunakan karena penulis ingin menjelaskan mengenai pengaruh

dieksekusi matinya *duo bali nine* terhadap hubungan Indonesia dengan Australia dalam bidang Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya saat ini.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana Respon pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia mengenai akan dieksekusi matinya dua warga Negara meraka yang tergabung dalam kelompok *bali nine*?
2. Bagaimana Hubungan antara Indonesia dan Australia pasaca dilakukannya eksekusi mati *duo bali nine* pada bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Pada hakekatnya tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan dan data yang bersifat teoritis dari berbagai sumber yang membahas tentang hubungan Indonesia dan Australia dalam segala aspek. Dengan alasan tersebut, penulis dapat menyusun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Respon pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia mengenai akan dieksekusi matinya dua warga Negara meraka yang tergabung dalam kelompok *bali nine*
2. Untuk mengetahui Hubungan antara Indonesia dan Australia pasaca dilakukannya eksekusi mati *duo bali nine* pada bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

## F. Manfaat penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberi manfaat yang berarti yaitu :

### 1. Pemerintah

Memberikan informasi atau sumbangsih pemikiran kepada para pengambil kebijakan diantara kedua negara mengenai hubungan Indonesia dan Australia pasca eksekusi mati *duo bali nine*.

### 2. Masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai hubungan Indonesia dan Australia pasca eksekusi mati *duo bali nine*.

### 3. Penulis

Sebagai sarana menambah pengetahuan tentang hubungan Internasional khususnya hubungan Negara Indonesia dengan Negara Australia pasca dilakukannya Eksekusi Mati *duo bali nine*.

### 4. Mahasiswa dan Perguruan Tinggi

Sebagai bahan bacaan dan literature bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian khususnya dengan kasus yang serupa yaitu hubungan internasional antara Negara Indonesia dengan Negara Australia

### 5. Menjadi informasi bagi masyarakat umum tentang hubungan Indoensia dan Australia pasca dilakukannya eksekusi mati duo bali nine